

# NASIONALISME DAN IDENTITAS KEWARGANEGARAAN : STUDI TENTANG PANDANGAN KEINDONESIAAN MAHASISWA ACEH

**Zuly Qodir**

Program Studi Magister Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: Zuly\_qodr@yahoo.com

## ABSTRAK

Kajian dalam tulisan ini berhubungan dengan Kebangsaan dan Keindonesiaan dengan mengambil kasus pandangan masyarakat Aceh di Yogyakarta memiliki tujuan untuk memahami beberapa pandangan, gagasan maupun kisah-cerita yang berkembang pada diri masyarakat mahasiswa, peneliti, pengamat dan pembuat kebijakan sebagai kelas menengah yang tengah studi di Yogyakarta yang penting untuk dipahami dan dimengerti oleh masyarakat akademik, maupun kelas menengah bahkan para pengambil kebijakan terutama di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.

Dari pemahaman tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan pada public tentang situasi psikologis dan nalar masyarakat yang berasal dari Aceh yang berada di Yogyakarta. Aceh dipilih karena daerah ini yang sering diidentikan dengan istilah-istilah sosiologis maupun politik dengan sebutan: daerah asal separatistis, pemberotakan bahkan hendak merdeka, karena factor GAM di Aceh daerah tersebut tetap menjadi bagian dari Indonesia sampai sekarang ini. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam pada para mahasiswa dengan *purposive sampling*, kajian literature, dokumen atas masalah kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologis.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang diwarnai dengan masyarakat majemuk di mana terdapat beragam identitas etnik, suku, adat, ras, dan agama, serta bahasa. Di Indonesia terdapat 300 lebih kelompok suku bangsa yang sifatnya berbeda dari kelompok lain. Di samping hal itu, mereka mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa khas. Kira-kira 210 juta penduduk Indonesia tersebar di lebih dari 14.000 pulau dan kurang lebih 1,5 persen jumlah penduduknya hidup dengan cara tradisional. Di Indonesia juga terdapat beragamnya agama. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang manjemuk karena terdiri dari beragam etnik, suku, adat, ras, dan agama, serta kebudayaan sebagai identitas yang berbeda-beda. Namun, dalam rangka menjaga kesatuan, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Semboyan nasional Indonesia ini merupakan satu bentuk keberagaman yang terintegrasi yang mengidentifikasi bentuk

negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bentuk kesatuan yang mengintegrasikan masyarakat sebagai satu identitas yaitu bangsa Indonesia.

Keberagaman identitas dan sifat kemajemukan menjadi keunikan identitas atau suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi yang majemuk dengan beragamnya etnik, suku bangsa, agama, dan kebudayaan sebagai identitas menjadikan masyarakat rentan dengan konflik. Rentannya konflik merupakan sebab dari pertentangan kebudayaan antar identitas. Setiap identitas etnik atau agama memiliki kebudayaan masing-masing yaitu pandangan, prinsip, dan cara menjalani hidup, dan tujuan yang berbeda. Dalam mencapai tujuannya, masing-masing kelompok memiliki cara dan kepentingannya yang berbeda namun harus bertemu dalam ruang kompetisi. Diawali dengan pertentangan kepentingan yang dimiliki setiap identitas etnik atau agama tersebut kemudian dapat memunculkan konflik. Konflik dapat terjadi pada antar kelompok dengan identitas yang berbeda yang saling berinteraksi dalam wilayah yang sama. Dari interaksi tersebut, pasti menimbulkan persepsi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang terkadang positif dan negatif karena perbedaan kepentingan tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk masyarakat Indonesia untuk menghindari konflik terutama konflik antar etnik termasuk suku bangsa, adat, atau agama.

Tantangan global tentang kebangsaan (ekonomi, politik dan kultur) terhadap keindonesiaan benar-benar menghadang di depan hidung Republik. Ekonomi liberal yang menghempas bangsa ini kian terus bergerak melaju nyaris tidak dapat dihentikan oleh elit politik, maupun perguruan tinggi sehingga berdampak pada mahasiswa dan masyarakat umum. Mahasiswa dan masyarakat umum bahkan terkena dampak ekonomi liberalistic yang belakangan menjadi kiblat ekonomi Indonesia. Persaingan pasar sebagai aksioma ekonomi memperhadapkan perekonomian Indonesia dengan para investor asing dan perusahaan-perusahaan transnasional. Perekonomian Indonesia tidak dapat berjalan dengan normal kecuali pola konsumsi yang meningkat sementara produksi kita melemah.

Budaya konsumtif, egoism dan cosmopolitan menjadi bagian tersendiri dari masyarakat Indonesia, yang melanda pula kalangan mahasiswa. Mahasiswa lebih menikmati makanan-makanan bergaya internasional seperti pizza hut, ketimbang gethuk atau terbuat dari sagu. Mahasiswa kita lebih memilih minuman bergaya internasional semacam coca cola ketimbang es tea, atau wedang jahe. Mahasiswa kita lebih memilih merek pakaian eropa semacam Laruso ketimbang batik Pekalongan atau Batik Solo. Demikian seterusnya yang menandakan adanya pengeroposan nilai-nilai terhadap lokalitas yang dianggap “kuno”.

Praktik-praktik politik kotor, politik uang, dan perilaku kekerasan warga Negara terhadap sesama warga Negara menggambarkan rapuhnya semangat kebersamaan dan kebangsaan yang bermuara pada semangat kedaerahan dan keagamaan yang eksklusif dan sempit. Hal seperti ini tentu tidak boleh terus berlangsung di Indonesia yang tengah memasuki abad persaingan global dan menapak demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia. Jika praktik-praktik politik kotor, keagamaan yang sempit, kemasyarakatan yang eksklusif tidak dieksklusikan akan mengkhawatirkan kebangsaan kita yang belakangan terus didera oleh kekuatan-kekuatan internasional dan regional tentang politik, ekonomi dan kewilahan.

Keindonesiaan yang dipersoalkan oleh kaum muda dan intelektual sebab kaum muda agak sulit menemukan teladan dari para elit politik dan politisi nasional maupun lokal. Keindonesiaan sekarang ini seakan-akan hanya terbayangkan oleh kaum elit yang terdidik dan lebih mengerikan lagi, keindonesiaan identik dengan ke-Jawa-an bukan termasuk luar Jawa. Padahal Indonesia tidak hanya Jawa, tetapi dari Sabang-NAD sampai Papua. Anekdote bahwa Indonesia hanya akan terdiri dari Banten sampai Banyuwangi dikhawatirkan akan benar-benar terjadi ketika wawasan kebangsaan dan keindonesiaan tidak ada lagi dikalangan mahasiswa dari Nanggroe Aceh Darussalam.

Kekhawatiran akan hal tersebut tampaknya cukup beralasan, sebab belakangan etnisitas dan komunalisme yang menjadi bagian dari kehidupan politik dan etnis di Indonesia. Masalah-masalah yang disebut dengan kedaerahan seperti penyebutan istilah ASLI dan Pendetang adalah bagian dari ekspresi kekecewaan politik dan etnis yang akan berbahaya bagi pemahaman dan wawasan keindonesiaan kita. Semua ini tentu mengkhawatirkan dan harus diwaspadai oleh pelbagai pihak termasuk perguruan tinggi jika tidak ingin generasi muda Indonesia seperti mahasiswa tidak kehilangan semangat kebangsaan dan keindonesiaannya.

Masa depan keindonesiaan dan nasionalisme yang mengkhawatirkan dengan banyaknya persoalan etnisitas (etno religio nationalism) dan sektarianisme dalam politik lokal. Berbagai masalah di tingkat lokal seperti di NAD sebenarnya cukup mengkhawatirkan apalagi jika tidak segera direspons secara positif, tetapi dengan respons yang membabi buta alias kurang mendekati dengan perspektif sosiologis ataupun humaniora, tetapi perspektif keamanan maka akan berujung pada kekerasan komunal sebagaimana terus terjadi di Indonesia.

Kaum muda, khususnya mahasiswa sebagai buffer zone keindonesiaan kita yang telah rapuh. Berbagai macam kasus yang melanda Indonesia seperti korupsi yang marak terjadi di pelbagai daerah (dari Sabang-NAD sampai Merauke-Papua) telah membantu merapuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum yang lemah, politik uang yang bergelimang dalam setiap perhelatan politik seperti Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden bahkan pemilihan kepala desa telah menambah beban buruknya perpolitikan nasional. Masyarakat tercerabut dari tradisi berpolitik yang bermartabat, dan menjunjung keadilan dan kearifan dalam berpolitik. Musyawarah untuk mufakat yang merupakan bagian penting dalam proses politik tergerus karena tradisi politik voting yang diselenggarakan oleh para pimpinan dan elit politik nasional maupun lokal. Masalah etnisitas berdasarkan ikatan emosional kedaerahan dan keagamaan turut pula mewarnai buruknya perpolitikan Indonesia.

Gotong royong dan kerjasama sosial untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat nyaris hanya sebuah retorika politik belaka, sebab para elit politik nasional maupun lokal tampak bangga dengan berlomba-lomba memperkaya diri sendiri dan melupakan tugas mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu yang terjadi kemudian adalah proses peminggiran secara politik maupun ekonomi pada rakyat. Dari sana lahirlah semangat tidak percaya pada proses politik dan politisi termasuk partai politik, padahal proses politik merupakan hal yang harus terjadi. Semangat kederahan yang menguat tanpa disadari kemudian memupuk sektarianisme dan menghancurkan nasionalisme atau kebangsaan.

Aceh sebagai representasi daerah yang dianggap “terpinggirkan dan basis konflik” sosial, politik dan ekonomi bahkan etnis dan agama yang terus berlangsung hingga sekarang. Bahkan, Aceh sampai sekarang juga masih identik dengan aksioma politik separatism di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat organisasi masyarakat yang bernama Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan partai lokal dimana ditempat lain tidak didapatkan.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di awal, maka penelitian ini secara umum hendak mengetahui padangan masyarakat Aceh tentang wawasan kebangsaan dan keindonesiaan yang selama ini telah berkembang di kalangan mahasiswa. Dari pertanyaan umum ini, maka secara khusus penelitian ini hendak mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Aceh tentang Keindonesiaan?
2. Darimanakah asal usul pemahaman kebangsaan dan keindonesiaan yang dimiliki mahasiswa Aceh di Yogyakarta?
3. Bagaimana memproduksi dan merekonstruksi wawasan kebangsaan untuk dan Keindonesiaan mahasiswa Aceh di Yogyakarta.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif-eksplanatif atas fakta lapangan yang didapatkan, berdasarkan data etik (teoritik konseptual dari pihak lain tentang wawasan kebangsaan dan kearifan lokal dan etik (berhubungan dari yang diteliti sebagai subjek). Data yang telah diperoleh hendak dijelaskan dengan metode deskriptif analitik sehingga didapatkan gambaran tentang masalah yang dikaji secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan data yang hendak dikaji, penelitian ini mempergunakan metode pencarian data melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan kajian literature yang terkait dengan topic penelitian. Wawancara mendalam hendak dilakukan kepada masyarakat Aceh yang berada di Yogyakarta khususnya yang berada di UGM baik program master atau pun program doctor. Sementara, FGD hendak dilakukan kepada mahasiswa masyarakat yang ada di Yogyakarta di luar UGM. Sedangkan literature berasal dari hasil kajian peneliti-peneliti sebelumnya yang terkait tema penelitian. Setelah data diperoleh akan didisplai dan dianalisis dengan mempergunakan pendekatan kualitatif analitik.

## **D. Kajian Pustaka**

Buku *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, yang diedit oleh Soerjanto Poespowardojo dan M Frans Parera (1994), merupakan buku berkenaan dengan pendidikan wawasan kebangsaan yang perlu dilakukan dan bagaimana seharusnya menanamkan wawasan kebangsaan di Indonesia. (bersifat teoritik dan konseptual). Buku ini memberikan penjelasan tentang pelbagai persoalan yang dihadapi Indonesia

pada era globalisasi ekonomi, politik dan budaya yang mengancam keindonesiaan dan kebangsaan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian serius masalah wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, jika Indonesia tidak ingin seperti Uni Soviet yang kemudian terpecah-pecah menjadi pelbagai Negara merdeka sendiri-sendiri.

Buku *pendidikan kegelisahan sepanjang zaman*, (2004), yang diedit oleh Sindhunata memberikan kerangka dan penjelasan problema pendidikan di Indonesia yang serba instan dan menelikung. Buku ini bersifat teoritik mengurai masalah-masalah pendidikan yang dialami pendidikan di Indonesia). Buku ini menguraikan pelbagai masalah yang dihadapi pendidikan kita di Indonesia. Masalah-masalah tersebut antara lain persoalan penanaman nilai untuk membentuk karakter peserta didik dari masa pendidikan menengah sampai perguruan tinggi yang menyebabkan tamatan sekolah tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dibangga dengan wawasan nasional ataupun tentang wawasan keindonesiaan apalagi wawasan mengenai lokalitas. Pendidikan kita terlalu instrumentalis demikian kata Daoed Joseof dan Mohtar Buchori dalam tulisannya.

Buku *Social capital : a Handbook*, (Robert Putnam, 2011), memberikan penjelasan tentang ruang lingkup capital social di muka bumi yang dapat menjadi bagian dari kekayaan masyarakat yang bersifat non material. Buku ini memberikan kerangka konseptual tentang debat social capital di kalangan akademisi internasional yang dapat dipakai sebagai salah satu acuan mengadopsi masalah-masalah yang terdapat dalam sebuah masyarakat, yang dinamakan dengan kekayaan sosial seperti persaudaraan, kerja keras dan perjanjian adat misalnya. Dari sana kemudian dapat dijadikan landasan membangun kerangka bersama tentang sebuah gagasan besar tentang sebuah masyarakat yang dikehendaki secara nasional.

Artikel Mohtar Mas'ood, Rizal Panggabean dan M Najib *Sumber-sumber sosial bagi Peradaban dan Partisipasi: Kasus Yogyakarta, ISEAS, Singapura 2011*, memberikan gambaran tentang "keunikan Yogyakarta" dengan pelbagai karakteristik masyarakat yang ada di dalamnya. Masoed dan kawan-kawan memberikan deskripsi adanya factor-faktor sosial, pendidikan dan kepemimpinan tentang Yogyakarta sehingga dapat berjalan dengan damai dan toleran. Terdapat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang disebut sebagai elemen masyarakat sipil dan elemen cultural yakni keberadaan Kraton Yogyakarta terutama dibawah Hamengku Bowono IX.

Disertasi Nazaruddin, *Kajian Identitas Politik Aceh*, UGM 2010, memberikan peta tentang konflik yang terjadi antara Aceh dengan Republik Indonesia, para pihak yang terlibat dan masalah yang menjadi titik utama konflik. Nazaruddin memberikan penjelasan bahwa masalah utama konflik Aceh dengan Indonesia adalah masalah identitas Aceh yang "terkubur" oleh janji Indonesia sejak Soekarno sampai Soeharto. Disinilah Aceh, yang dalam hal ini diwakili Hasan Tiro (GAM) kemudian merasa ditelikung oleh kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan melepaskan identitas keacehan.

Apa itu identitas keacehan? Yakni identitas keislaman yang ada dalam negeri Indonesia tetap harus diberikan hak istimewanya dan tidak boleh ditawar-tawar. Oleh sebab itu ketika Presiden Abdurrahman Wahid memberikan hak istimewa NAD menjadi daerah Syariah, GAM memberikan lampu hijau untuk terus bergabung dengan Indonesia. Sekalipun dalam beberapa tahun terjadi peristiwa yang mengerikan, yakni

pembunuhan anggota TNI POLRI oleh GAM apalagi saat terjadi perang terbuka antara GAM dan TNI zaman Megawati Soekarno Putri menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid.

Garry van Klinken, *Perang kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, KITLF, 2007. Buku ini merupakan kajian atas beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Ambon, Poso, Ternate dan Kalimantan Tengah. Garry van Klinken memberikan gambar yang lebih detail mengenai konflik Ambon yang bergerakkn sejak tahun 1999 sampai sekarang. Terdapat banyak masalah di Ambon sehingga konflik terus berkepanjangan. Dalam bahasa Garry van Klinken terjadi “mobilisasi konflik” dan conflict contension sehingga menjadikan konflik tidak segera berakhir bahkan cenderung bertahan sangat lama. Ada banyak actor “bermain dalam konflik”. Namun dengan tegas, Garry van Klinken kemudian menyitir bahwa actor paling dominan dalam konflik Ambon adalah actor lokal. Siapakah mereka? Baik tokoh agama dari Kristen, muslim, politisi, birokrat dan aparat keamanan semuanya “bermain dalam konflik” sehingga menyebabkan konflik terus berkepanjangan sebab aktornya mengetahui cirri khas masyarakat Ambon sendiri. Para actor yang berkontestasi dalam peta Ambon merupakan, para actor yang telah lama malang melintang dalam perpolitikan nasional, perpolitikan lokal dan berinvestasi secara politik.

Tamrin Amal Amagola, dkk, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barata, Maluku dan Poso*, ICIP 2007. Dalam buku hasil riset di beberapa daerah dan ditulis banyak orang ini, dinyatakan bahwa salah satu akar persoalan konflik komunal Ambon adalah terjadinya ketidakadilan atas persoalan-persoalan lokal. Masalah kesenjangan daerah, pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang, kesejahteraan yang tidak merata, dan dominasi atas kelompok tertentu menyebabkan masalah terus menjadi bara dalam sekam. Bahkan, sejak terjadinya perpindahan penduduk di Maluku dari Jawa menyebabkan Maluku semakin “sempit” untuk orang Maluku. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, dan kebetulan berbeda etnis dan agama, sehingga memudahkan terjadinya kecurigaan atas mereka. Dominasi menjadi masalah yang serius di Maluku dan terjadi perubahan sosial yang cepat sehingga masyarakat tidak mempersiapkan dirinya.

Namun ada hal yang sebenarnya dapat dijadikan pijakan untuk membangun daerah konflik yang selama ini terjadi, yakni dengan menumbuhkembangkan apa yang dinamakan kearifan lokal sebagai basis perdamaian lokal. Disinilah dibutuhkan keberanian dan kearifan nasional untuk mengangkat kearifan lokal dalam konteks keindonesiaan.

R. Michael Fenner dan Patrick Daly, *Memetakan Masa Lalu*, KITLV, 2011. Buku memberikan penjelasan yang detail soal soal masa lalu di Aceh yang menjadi beban dalam perjalanan Aceh berikutnya sampai sekarang. Ada masalah terkait identitas Aceh. Ada masalah soal sumber daya manusia Aceh. Ada pula masalah Sumber Daya Alam Aceh yang menjadi pusat perhatian dan persengketaan antara Indonesia dan masyarakat Aceh. Dalam kajiannya, Feneer menjelaskan masalah-masalah tersebut menjadi bagian dari kehidupan Aceh masa sekarang yang terus membebani. Oleh sebab itu, memahami Aceh sebenarnya tidak mungkin tanpa memahami masa lalu Aceh yang penuh dengan tradisi islam dan kerajaan Islam.

## E. Kerangka Teoritik dan Penjelasan Konseptual

Untuk menjelaskan masalah yang hendak diteliti dalam kajian ini hendak dipergunakan beberapa kerangka dan penjelasan mengenai konseptual atau konseptualisasi atas masalah yang akan dikaji. Beberapa pendekatan teoritik dan konseptual tersebut berkaitan dengan :

### (a) Teori tentang Produksi dan Reproduksi Kebudayaan

Soal produksi dan reproduksi hendak didekati dengan perspektif yang sifatnya sedikit ideologis sebagaimana dikemukakan Louis Althusser ketika menjelaskan munculnya pelbagai gagasan mengenai ideology yang kemudian diproduksi dan direproduksi oleh kelas tertentu dalam masyarakat. Sebagai sebuah ideology, gagasan akan berkembang menjadi semacam gagasan politik selain sekaligus menjadi gagasan kebudayaan karena berkembang pada masyarakat yang kemudian disebut “terdidik” secara sosial politik. Selain Althusser, sebenarnya terdapat sosiolog Perancis, Piere Bourdiou yang juga mengintrodusir tentang reproduksi kebudayaan dengan menggunakan istilah yang popular disebut tradisi habitus sehingga popular dengan sebutan sebutan teori habitus, sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang seakan-akan ideologis dan lazim adanya, sekalipun hal tersebut tidak baik atau semula dianggap tidak biasa kemudian menjadi biasa. Itulah habitus yang kemudian menjadi kebudayaan masyarakat termasuk di Indonesia.

### (b) Konsep tentang Kebangsaan dan Keindonesiaan

Konsep tentang kebangsaan mengacu pada konsep yang menjelaskan tentang keragaman dan keunikan bangsa Indonesia yang menjadi dasar membentuk Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai sekarang. Kebangsaan dimaknai sebagai konsep yang menjelaskan tentang suku-suku etnisitas dan agama yang terdapat di Indonesia, dimana dengan kesadarannya kemudian menyatu dalam bangunan bangsa bernama Indonesia. Sedangkan keindonesiaan adalah konsep yang menjelaskan tentang Negara Indonesia sebagai satu kesatuan dalam keragaman etnisitas, agama, suku dan budaya dalam wadah kebhinekaan.

## F. Analisis Penelitian

Data penelitian yang telah tersedia hendak dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif analitik yang mendasarkan pada temuan lapangan tentang pandangan mahasiswa Aceh tentang kebangsaan, keindonesiaan dan asal mula datangnya pengetahuan tentang kebangsaan dan keindonesiaan selama ini.

## G. Analisis Hasil Kajian

### I. Aceh dalam Keindonesiaan

Dalam pandangan Taufik Abdullah mengatakan bahwa kita dan generasi muda sekarang miskin sekali pemahaman sejarah. Memahami proses sejarah dan periodisasi sejarah sesuai konteks dan perkembangannya cukup penting. Dengan

demikian generasi muda mendapat pemahaman sejarah tempo dulu, memahami kedudukan sejarah kekinian dan ke depan mampu menterjemahkan kepentingan peradabannya dengan baik.

Tanpa memahami sejarah kata taufik maka generasi muda khususnya mahasiswa kurang mampu berbenah dan membangun peradaban Aceh lebih kuat dan bermartabat. Pemahaman sejarah masa lalu dan konteks kekinian pasca perdamaian perlu ditulis apa adanya dan dikonstruksikan dengan tepat agar perdamaian dan pembangunan lebih maju dari sekarang. Pemerintah Aceh sekarang benar-benar dapat mengendalikan subtansi perdamaian dengan baik, tulus dan bersungguh-sungguh. (wawancara, 20/9/2012)

Sementara Tgk. Yahya Muaz ketikaditanyakan kepadanya tentang Aceh, menjelaskan kronologis sejarah Aceh tentang bagaimana masyarakat Aceh dulu dan bagaimana masyarakat Aceh sekarang? Peradaban Aceh dulu kuat dan disegani karena tatakelola pemerintahan dilandasi pada kekuatan hukum. Supremasi hukum di Aceh lebih tua dari Kerajaan Inggris. Kegemilangan Aceh juga ditopang oleh tatalaksana pelabuhan dan pelayaran, sehingga menguasai perdagangan serta mampu menjalin hubungan diplomatik yang harmonis dengan kerajaan dunia. (wawancara, 20/9/2012)

Pada era kolonialisme, Aceh tampil sebagai kekuatan utama di nusantara. Walaupun Aceh dihadapkan perang panjang namun tetap tangguh menjelang berakhirnya kolonialisme. Sejarah panjang Aceh semakin mengkrystal ketika pada tahun 1945 s.d 1950 tampil sebagai penentu lahirnya negara baru bernama Indonesia. Siaran radio rimba raya, blokade medan area pada agresi pertama dan kedua dimana masyarakat Aceh menjadi kekuatan bagi kemerdekaan Indonesia. Tidak cukup waktu dan panjang untuk menjelaskan peran Aceh untuk kemerdekaan Indonesia. Karena itu Aceh menjadi daerah khusus dalam NKRI. Sejarah dan peradaban Aceh yang panjang dan menjadi wilayah khusus tak terbantahkan dalam perang kemerdekaan Indonesia kata Tgk. Yahya Muat. (disampaikan oleh Nasaruddin, 19/9/2012)

Sementara menurut Sekretaris jenderal Partai Aceh memaparkan sebab-sebab pergolakan politik keacehan dalam keindonesiaan. Perjuangan DI/TII, lahirnya Ikrar Lamteh, perjuangan GAM dan gerakan referendum. Seterusnya, Tgk Yahya menjelaskan subtansi pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki dan upaya-upaya implementasi UUPA dijelaskan cukup menarik melalui infokus (layar tembak). (wawancara 20/9/2012)

Dalam padangan mahasiswa cukup antusias mempertanyakan kembali tentang nasionalisme Menurut Zulkifli salah dengan agak emosional mengatakan Aceh adalah “kepala Indonesia”. Aceh akan tetap menjadi modal bagi keutuhan Indonesia jika Aceh benar-benar terlaksananya “self goverment”. Cukup mendesak katanya pemerintah Aceh perlu menyelesaikan berbagai qanun-qanun kewenangan dan kekhususan Aceh. Identitas Aceh seperti bendera, lambang dan himne agar segera diselesaikan sebagai bukti Aceh memiliki kekhususan dalam NKRI kata zulkifli. (wawancara, 20/9/2012)

Sementara menurut Akbar, mengatakan Aceh akan dihadapkan pada krisis identitas jika tidak berpegang teguh pada komitmen perdamaian. Agar tidak mengalami krisis identitas maka rakyat Aceh mesti belajar pada akar sejarahnya. Sejarah Aceh tempo dulu dan sejarah Aceh untuk kemerdekaan Indonesia bukanlah dogeng. Ini perlu dipahami dengan benar oleh pemerintah sekarang baik di Aceh maupun di Jakarta agar konflik tidak berulang kembali. (wawancara, 20/9/2012)

Sementara Zulkifli AG Dosen Unigha mengarisbawahi isu-isu yang berkembang dalam kondisi sekarang ini ada beberapa hal. Pertama, agar Aceh tidak mengalami krisis identitas maka kebutuhan terhadap lembaga penelitian sejarah Aceh cukup penting. Kedua, sejarah panjang Aceh sampai perang kemerdekaan Indonesia, termasuk bagaimana perdamaian dicapai saat ini perlu dipahami generasi muda Aceh agar mereka siap membangun lebih baik. Ketiga, untuk tujuan ini perlu adanya kurikulum sejarah Aceh diajarkan pada sekolah-sekolah dasar sampai menengah. Mata pelajaran sejarah yang diajarkan selama ini sepertinya terputus padahal Aceh menjadi kekuatan utama kemerdekaan Indonesia. (wawancara, 18/9/2012)

Kekuatan militer rakyat, semangat juang, sumber daya alam dan kapasitas manusianya yang handal masih tersisa—maka bukanlah hal mustahil Aceh mendirikan negaranya sendiri dengan tegak. Namun fakta yang terjadi sebaliknya, marah bercampur kecewa hanya dimanifestasikan dalam pemberontakan DI/TII, sebuah Negara Islam Indonesia (NII) tahun 1953 dibawah kepemimpinan Kartosuwiryo, yang bermarkas di Jawa Barat.

Biarpun tersirat dalam ambisi Daud Beureuh mendeklarasikan Republik Islam Aceh (RIA) namun keputusannya dijunjung tinggi ketika kembali dalam NKRI melalui Piagam Ikrar Lamteh. Karakternya yang keras tapi santun dibuktikan menolak halus semua pelayanan dan fasilitas yang disodorkan pemerintah. Akan halnya dengan Hasan di Tiro, ternyata marah, kecewa dan dendam terlanjur berkalang dalam jiwanya. Dimulai saat membaca sebuah surat kabar di New York tentang pembantaian di pedalaman Montasik—rasa memiliki Aceh yang sempat dipendam didadanya berkobar jua.

Hasan di Tiro tak tanggung mengobarkan radikalisasinya dalam manifesto; Indonesia tidak lebih neo-kolonialis pasca Belanda. Ikrar Lamteh dinilainya cek kosong. Demokrasi untuk Indonesia wujud akal budinya yang diterbitkan tahun 1958, dianggap etnosentrisme-rasisme. Padahal jika kita renungi Hasan di Tiro sungguh kesejatan bagi Indonesia. Betapa tidak, ketika itu masyarakat nusantara yang telah berintegrasi dalam negara modern bernama Indonesia disarankan setiap distrik atau propinsi dijamin hak dan kewenangannya.

## **2. Etnisitas Aceh dan Budayanya**

Sejarah mencatat, demi mempertahankan Indonesia Merdeka bukan hanya harta benda, tenaga, pikiran, akan tetapi rakyatnya siap menyumbang nyawa—berbondong-bondong mara ke Medan Area memblokade Belanda agar tidak masuk ke Aceh. Endatu, termasuk orang-orang tua kita yang masih hidup sebagai saksi, bercerita Aceh menjadi benteng terakhir pengakuan Indonesia di Konferensi Meja Bundar, Den Haag.

Diawal proklamasi para datu kita juga bercerita apakah Aceh menyatu dengan Indonesia atau menegaskan diri sebagai sebuah entitas politik—yang terbukti dalam sejarahnya sebagai sebuah kerajaan yang utuh dan mandiri. Inilah pilihan ulama kita—dengan kearifan dan kebijaksanaannya menyatakan diri dengan tegas menjadi bagian dari Indonesia Merdeka. Dalam situasi yang sulit, dilema dan atas penegasan sikap itu ironisnya gejala muncul tanpa bisa ditepis.

Endatu kita bercerita revolusi sosial meledak tak terelakkan. Antara kemunafikan dan kejujuran serta bercerai-berainya ketulusan akan solidaritas entitas politik Aceh—terutama akibat perang panjang dengan Belanda—akhirnya darahpun tumpah. Perang saudara ini disesalkan para endatu kita. Fakta ini membuktikan betapa demi Indonesia bukan saja darah merah sesama anak bangsa mengalir segar—bahkan juga tetesan beningnya air mata tidak selalu pengorbanan bermuara pada kebaikan dan kedamaian.

Sebab itu, kita sering tertunduk malu saat orang-orang tua kita mengingatkan untuk tidak menzalimi sejarah. Kata orang-orang tua kita terlalu dhaif mempertentangkan pembelahan elit sosial dan politik ulama dan uleebalang dalam revolusi sosial itu. Terlepas siapa pengkhianat dan pejuang pada kenyataannya Aceh adalah pembela sejati konstitusi negara Republik Indonesia.

Kesejatian Aceh dalam sejarahnya yang retak-retak itu sepertinya selalu dihadapkan pada prasangka, kecewa, lalu memberontak. Jelas sekali ketika dihadapkan pada prasangka—maka Aceh dileburkan menjadi sub-ordinat propinsi Sumatera Utara. Sangat mungkin Jakarta dibawah api revolusi Soekarno khawatir propinsi diujung barat pulau Sumatera ini berpotensi besar akan memisahkan diri.

Pikiran paranoid atas ambisi menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat lantas meletakkan Aceh sebagai ancaman—sungguh menyesatkan. Tak heran aliran sesat dan api revolusi Soekarno menyisakan bara sampai kini. Barangkali prasangka Aceh akan memisahkan diri dari sebuah negara yang dilahirkannya bernama Indonesia—tidak lebih taksub atas rasionalitas dan kebinatangan manusia sebagai insan politik. (Wawancara, Nirzalin, 20/9/2012)

Cita-citanya Indonesia yang damai, makmur dan sejahtera hanya mungkin dicapai dengan menganut sistem desentralisasi politik. Ide ini menakutkan ibukota yang memang baru beranjak balita. Disisi lain, fakta historis ia adalah trah di tiro yang sangat heroik. Keluarganya sambung-menyambung mengendalikan estafet perlawanan mengusir Belanda, yang ditabuh sejak 1873. Aceh sebagai simbol perlawanan kolonialisme dan imperialisme masyarakat nusantara ketika itu berakhir ketika trah di tiro dihabisi satu persatu.

Tak heran spiritnya menjadi mudah bergejolak ketika situasi begitu kontras dengan fakta yang dilihat dan dibacanya. Keyakinannya bertambah bahwa dialah tetesan terakhir trah di tiro yang mesti memimpin perlawanan—walau musuhnya kini bernama Indonesia. (wawancara, Nasaruddin, 20/9/2012)

Instabilitas politik di Jakarta pasca reformasi dan radikalisasi ide di tiro sangat mungkin disintegrasi menjadi nyata. Lepasnya Timur-Timor pengalaman berharga bagi Jakarta. Makanya spirit perlawanan yang membabi-buta perlu dicegah

dengan membuka ruang apresiasi dan kebebasan politik walaupun berhadapan pil pahit referendum. Setidaknya hal itu kita saksikan bisa mengobati luka rakyat Aceh akibat tragisnya operasi militer puluhan tahun lamanya.

Memang, luka dirasakan sudah parah. Kepedihan akibat operasi militer sejak pembelakuan daerah operasi militer (DOM), yang setelah dicabut ternyata diikuti pola yang sama—dimana pendekatan, sandi, jejaring intelejen dan brutalisme nyatanya tetap menjadi pilihan ketika menguatnya gerakan referendum. GAM yang awalnya mengandalkan perlawanan senjata merasa dibela atau juga berlindung dengan arus utama gerakan referendum. (Wawancara, Kemas Pasha, 10/9/2012)

Begitulah, Aceh senyap dalam jeritan penindasan puluhan tahun. Kekuatan moral gerakan sipil politik dengan mengusung referendum menjadi energi positif dan menguatnya kesadaran kolektif. Malahan aksi kolosal masyarakat di Jakarta dan pulau Jawa serta di berbagai daerah serta simpul-simpul gerakan sipil diberbagai negara tak kalah heroiknya dengan gertakan referendum yang mengemuka di Aceh.

Badai kolektivitas membuat bos pejuang referendum jengkel. Katanya akan bergabung dengan GAM jika referendum tidak digubris Jakarta. Gertak tersebut menjadikan popularitas aktivis semakin populis dimata rakyat—namun polarisasi dan fragmentasi gerakan sipil politik sekaligus eskalasi gerakannya mencapai klimaks pasca Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (Sira-Rakan) tak dapat dielakkan, selebihnya para aktivis terperangkap target operasi intelejen baik TNI/Polri maupun GAM. Polarisasi dan fragmentasi sejak awal reformasi mengelinding nampak tersemai dilahannya sendiri, sunyi dan senyap.

### **3. Mahasiswa Aceh dan Keindonesiaan**

Dikalangan mahasiswa sangat beragam argument tentang keindonesiaan dan kebangsaan. Hal itu, sebenarnya tidak serta merta dapat dikatakan bahwa karena masyarakat Aceh mengatakan identitasnya adalah “dengan kultur Islam” atau kultur Aceh kemudian dapat dikatakan ingin berpisah dari Indonesia. Sebab dalam sejarahnya Aceh merupakan provinsi yang mendukung Indonesia merdeka dan memmberikan sumbangan yang tidak kecil untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang memiliki ikatan historis tentang keindonesiaan dan kebangsaan sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang.

Sebagaimana dikatakan Dr. Nazarudin ketika berbicara mengenai nasionalisme bagi orang Aceh akan di petahkan dalam beberapa fase: yakni: (1) Zaman kerajaan: Rasa nasionalisme di era ini diwarnai dengan spirit keAcehan dan budaya Islam yang kuat. (2) Zaman Penjajahan: Spirit nasionalisme ke-Acehan nampak dalam bentuk perlawanan tidak mau dijajah. (3) Kemerdekaan: Spirit nasionalisme keAcehan terkontaminasi dengan spirit nasionalisme keindonesiaan.

Menurut Taufik, isme itu penting bagi setiap bangsa agar generasi di dalamnya mengenal diri, bersatu padu, mengembangkan kemampuan dan potensinya agar berdaya saing. Isme itu bukan paranoid dan taksu (egoisme, kebencian dan permusuhan), tapi kesadaran untuk membangun bangsa ini lebih baik tanpa melupakan sejarah dan akar peradabannya. Transformasi politik keAcehan

dalam konteks sekarang semestinya harus dikembangkan ke arah tersebut. Karena kesadaran elit dan khususnya pemuda Aceh terasa mengalami disorientasi. Kepeloporan pemuda Aceh ke depan harus mampu menerjemahkan MoU Helsinki agar perdamaian Aceh lebih sempurna, katanya.

Untuk itu, Taufik menekankan agar kepeloporan pemuda perlu ditumbuh kembangkan sehingga mereka sadar dan mampu memformulasikan isme-nya lebih progresif dan substantif. Artikulasi peran pemuda Aceh, kata dia, masih ditunggu dan dibutuhkan. Implementasi UUPA sesuai MoU Helsinki belum berjalan sebagaimana mestinya, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia maupun yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Ini kan belum berjalan, kata Taufik.

Ia menegaskan, ketika isme lentur di kalangan generasi muda, maka demoralisasi moral dan karakter sebuah bangsa juga mengalami krisis akut. Kita mesti sadar, isme Aceh dalam konteks politik kontemporer baru saja dimulai. Dan, untuk itu perlu ditumbuhkembangkan agar pengalaman pahit masa lalu tidak berulang kembali. MoU Helsinki dan UUPA adalah isme baru antara Aceh dan Indonesia. Maka bagaimana membangun adonan nasionalisme itu lebih nyata, dalam ide dan praktek, katanya.

Karena itu, lanjut Taufik, ke depan bagaimana kesadaran atau isme itu dibangun dengan tanpa pura-pura, sehingga identitas dan integritas politik, damai dan menyeluruh, selamat dan bermartabat bagi Aceh dan Indonesia dapat terwujud. Tanpa kepeloporan, katanya, pemuda bagai mimpi harapan tersebut dicapai. (wawancara, 3/9/2012)

Dari sana muncul pertanyaan mengapa Aceh mau bergabung dengan RI padahal Aceh punya wilayah, SDA, militer yang terus berjuang melawan kolonial. Sukarno representasi dari RI minta Bantuan Daud Beureueeh terjadi negosiasi dan kompromi dimana Daud mengusulkan Republik Indonesia sebagai negara Islam sesuai dengan semangat nasionalisme keAcehan pula. Dalam negosiasi tersebut Aceh diberikan hak istimewa namun realitasnya tidak disepakati maka muncul DITIL I. Daud Beureueeh mengapa Aceh harus di bawah Sumatera (sistem pemerintahan kepulauan). Aceh membantu RI namun tidak ada respons balik. Maka pada tahun 1974 muncul GAM sebagai representasi kultur dan identitas. Hasan Tiro mengatakan ketika ada tirani dan penderitaan maka harus merdeka. Untuk memotifasi semangat keAcehan secara masive maka perlu memunculkan isu-isu kejayaan Aceh masa lalu. Disini nampak nasionalisme keAcehan semakin kental dengan sikap patriotism yang menjadi bagian dari etos perlawanan kepada penjajahan colonialism.

Sedangkan pada zaman Soeharto. Oleh sebagian pengamat dan ahli Aceh, Aceh berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga bibit bibit separatism muncul dari Aceh. Sebab pada zaman itu, dimana zaman Soeharto berkuasa Aceh seperti sedang terjadi genoside dan dihancurkan. Aceh menjadi daerah operasi militer dengan resiko para militer memperkosa perempuan Aceh. Masyarakat Aceh merasa sakit hati terhadap RI karena dihianati. Ketika Aceh menuntut keadilan ditanggapi dengan pedil dan militerisme. Aktivis dan LSM yang

muncul berbicara Aceh terkait dengan konflik yang melanda Aceh serta SDA yang di garap untuk kepentingan RI dan pihak asing bukan untuk kemakmuran Aceh. Oleh sebab itu GAM menuntut merdeka sehingga lahirlah referendum.

Terlihat disana adanya perbedaan secara filosofis mengenai referendum antara pihak GAM dan mahasiswa. GAM melihat referendum untuk merdeka, sebaliknya bagi mahasiswa referendum adalah media untuk menyerahkan pilihan kepada masyarakat yang lebih demokratis. Dimana proses tersebut melibatkan semua unsur termasuk perempuan diberikan kesempatan bahkan berhak menentukan pilihan hidup. Namun sudah ada semacam stereotype bahwa yang namanya referendum berarti terjadi disintegrasi atau Aceh merdeka dan lepas dari NKRI. Muncul kongres mahasiswa serantau sebagai sentral informasi referendum Aceh menggagas terjadinya sidang umum majelis perjuangan referendum yang juga menghadirkan masyarakat Aceh. DPRD menandatangani petisi yang isinya memperjuangkan referendum. Aceh seperti sapi perahan RI mengambil hasil namun dibiarkan kurus.

Oleh sebab itu ketika berbicara nasionalisme keindonesiaan kelihatan masyarakat Aceh merasakan adanya unsur dipaksakan harus memilih GAM atau Indonesia, padahal itu hanya gambaran sedikit orang saja, bukan sebagian besar orang Aceh, sebab GAM juga memberikan dampak negative pada sebagian orang Aceh, namun buat sebagian orang Aceh, GAM adalah pahlawan. Nasionalisme dan keindonesiaan akhirnya dalam ruang yang dipaksakan melalui media pendidikan, melalui statement GAM itu separatis, militer, KTP Aceh yang berbeda dengan masyarakat lain di Indonesia dimana warna RI yang ditanda tangani oleh militer bukan instansi pemerintah. Jadi nasionalisme keindonesiaan disini nampak adalah nasionalisme versi militer, menghafal Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia raya. Yang menarik di sini jika terjadi operasi dan ketika menemukan orang Aceh jika tidak bisa menghafal Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia raya maka dinilai GAM dan ditindak bahkan sebagian ditembak. Selain itu harus mengenal tokoh-tokoh penting RI sebagai bentuk kesetiaan terhadap NKRI. Jika ada yang tidak tahu maka akan berhadapan dengan senjata, direndam atau hukuman lainnya bahkan dituduh separatis.

Hal seperti itu harus segera diakhiri sehingga masyarakat Aceh tidak melihat Negara RI adalah musuh masyarakat Aceh, sebab Aceh selama ini memiliki kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Aceh dengan Otonomi Khusus pemberlakuan Perda Syariah, tetap harus dihargai menjadi bagian dari Indonesia, sebab prinsip menjaga keutuhan dalam keragaman harus dijaga bukan dirombak menjadi kesamasan dalam keragaman. Hal seperti itu harus dihilangkan agar masyarakat Aceh dapat menjalankan prinsip-prinsip Islam yang diyakini menjadi identitas dari Aceh. Asalkan tidak minta merdeka maka pemerintah tidak perlu takut pada masyarakat Aceh demikian kata Dr. Nazaruddin.

Untuk merubah pandangan masyarakat tentang nasionalisme Aceh yang seakan-akan identik dengan perlawanan atas pemerintah harus melibatkan banyak pihak yakni: pihak pendidikan kewargaan yang sebenarnya tentang keragaman dan kesatuan, lewat NGO melalui misi kemanusiaan. Muncul nasionalisme keAcehan di era modern harus dimunculkan, sehingga masyarakat Aceh tetap menjadi

Indonesia, sekalipun memiliki kekhususan dalam hal syariat Islam. Jangan sampai masyarakat Aceh tergerus dalam pola hidup dan perilaku bersifat konsumtif akibat banyak restorasi fast food, hotel bintang. Budaya kolektif berubah menjadi individu. Individualisme muncul di Aceh mereduksi nasionalisme keAcehan.

Setelah konflik yang terjadi antara Soekarno dengan Daud Breureh, masyarakat Aceh tetap menghormati nasionalisme Keindonesiaan tetapi tetap berkebangsaan Aceh namun tetap bagian dari NKRI. Ketika berbicara keadilan kepada masyarakat Aceh sebagian merasa diperlakukan belum adil, karena itu perlu direvisi menjadi lebih adil. Realitas sosial inilah yang turut membentuk rasa etnisitas Aceh yang tinggi, sekalipun sebenarnya hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Aceh karena unsure politik dan akses.

Sesuai dengan data temuan konflik antar agama di Aceh, ternyata yang menjadi penyebab segregasi masyarakat di Aceh berdasarkan agamanya adalah pengaruh dari pemerintahan pusat. Disebutkan bahwa segregasi yang terjadi antara Kristen dan Islam awalnya dibentuk oleh pemerintahan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan lebih memihak dan menganggap unggul kelompok yang beragama Kristen. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan yang dirasakan oleh kelompok beragama Islam yang kemudian hanya bekerja menjadi pedagang. Seiring berjalannya masa hingga sampai pada masa Orde Baru, kelompok beragama Islam menjadi lebih sukses dari berdagang dengan kondisi yang lebih baik dari kelompok beragama Kristen, banyak juga pendatang dari sekitar Maluku untuk berdagang di Aceh. Selain itu muncul intelektual-intelektual ekonomi di mana pada masa Orde Baru, pemerintah mengangkat intelektual ekonomi dari kelompok beragama Islam tersebut dalam pemerintahan sehingga lebih dianggap unggul. Dalam hal ini, terjadi ketimpangan bagi kelompok beragama Kristen. Pada dasarnya ketimpangan terjadi tidak membawa perbedaan agama, namun sebagian besar adalah kelompok beragama sama.

Dengan analisa teori interaksionisme simbolik mengenai hubungan antar etnik, perbedaan yang terjadi antara umat Islam dan Kristen di Aceh pada awalnya merupakan hasil konstruksi pemerintah, baik pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, pemerintah merekonstruksi struktur yang ada pada masyarakat di Aceh sampai menimbulkan ketimpangan yang dirasakan sebagian besar kelompok agama yang berbeda. Kemudian ketimpangan tersebut diprovokasi sebagian orang sehingga menimbulkan konflik antar umat beragama secara menyeluruh pada masyarakat di Aceh.

Konflik yang terjadi di Aceh jika dianalisa melalui interaksionisme simbolik merupakan bentuk dari konstruksi pemerintah sebagai agen yang menentukan struktur masyarakat Aceh dalam kelas supe-ordinat dan subordinat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat Aceh memiliki kedudukan yang lebih tinggi sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok Islam memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik yang menimbulkan kesenjangan social kurang mendapatkan perhatian. Dalam struktur masyarakat yang awalnya dikonstruksi oleh pemerintah, menimbulkan definisi kolektif yang kemudian mekonstruksi keadaan struktur masyarakat juga. Adanya kondisi ekonomi yang berbeda menimbulkan

interpretasi atau definisi situasi pada satu kelompok bahwa terjadi ketidakadilan dan kesenjangan dalam aspek ekonomi dan sosial. Konstruksi ketidakadilan ini yang kemudian menjadi konflik. Namun, konflik lebih disimbolkan sebagai konflik antara pusat dan daerah tentang kekuasaan.

## H. Kesimpulan

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sangat beragam kepentingan. Beragam memahami soal etnisitas, kebangsaan maupun keindonesiaan. Masyarakat tiga provinsi tetap memahami bahwa mereka sebenarnya tetaplah bangsa Indonesia, yang memiliki jiwa keindonesiaan hanya saja dalam beberapa tahun, mereka sebagai orang Aceh merasa dikebiri hak-haknya sebagai orang warga Negara oleh kekuasaan Orde baru selama 32 tahun lamanya.

Masyarakat Aceh memahami nasionalisme dan keindonesiaan versi Negara (pemerintah), sehingga mereka merasa mendapatkan doktrin tentang nasionalisme. Oleh sebab itu, perlu dirobohkan, sebab jika hal tersebut terus berlangsung hal yang harus segera dilakukan adalah penggalian yang mendalam atas paham dan pengalaman masyarakat asli atau lokal tentang kebangsaan dan keindonesiaan tentang nasionalisme Aceh dan keindonesiaan yang tumpang tindih yang telah memiliki pemahamannya sendiri tentang nasionalisme dan keindonesiaan. Tetapi selama ini direduksi oleh rezim politik yang memaksakan pemahaman nasionalisme dan keindonesiaan mereka.

Masyarakat Aceh berada dalam simpang jalan untuk mengibarkan nasionalisme dan keindonesiaannya sesuai dengan versi kekuasaan atautkah versi lokal, sebab yang selama ini dipahami antara versi penguasa zaman Orde Baru dan versi lokal (papua dan aceh). Inilah dilema yang terus terjadi dikalangan mahasiswa Aceh. Satu sisi harus mengaku sebagai Orang Indonesia karena memang tinggal di wilayah Indonesia, tetapi pada sisi lainnya dalam hatinya “jengkel dan ada kebencian” kepada perlakuan yang dialami masyarakat Aceh dengan pelbagai stigma dan peraturan yang tidak memberikan ruang kemerdekaan pada Aceh.

Terdapat banyak media yang dijadikan sarana mensosialisasikan nasionalisme dan keindonesiaan mahasiswa Aceh misalnya dengan mengadakan diskusi-seminar, pertunjukan seni dan budaya, serta membuat symbol-simbol masyarakat Aceh agar mengimplementasikan budaya lokal (local wisdom) untuk paham kebangsaan dan keindonesiaan.

Ulama tidak henti mendesak dialog dan perlunya perdamaian demi mencegah kehancuran. Namun ketika suara ulama tidak mendapat tempat sebagai pertanda Aceh ditakdirkan terus-menerus dalam prahara. Selagi manusia didalamnya tidak mau merubah nasib bangsanya bersama-sama, dan disaat darah, luka dan air mata mengalir deras, lalu pemilik alam semesta menegur mereka dengan gempa dan tsunami.

Dalam keadaan ditimpa musibah ada dua tokoh yang baik hati sejak dari awal memahami konflik Aceh, lagi pula keduanya saat itu mengendalikan dan menahkodai republik, Pak SBY dan Pak JK berpikir dan bertindak cepat, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 terbitlah MoU Helsinki. Proses demobilisasi TNI/Polri organik ditarik

kembali ke barak masing-masing. Senjata pejuang GAM dipotong demi mengapai perdamaian.

Selain itu, terdapat pula media yang dipakai sebagai sarana “perlawanan atas pemaksaan” paham nasionalisme dan keindonesiaan atas Aceh di Yogyakarta, misalnya dengan menghadirkan tarian-tarian asli Aceh, serta membuat perkumpulan-pekumpulan asli dari masing-masing daerah asal Aceh.

Terdapat banyak actor “bermain” dalam pembentukan nasionalisme dan keindonesiaan Aceh. Disana ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional maupun lokal (Local NGO) dan aparat keamanan yang saling berebut ruang untuk menghadirkan wacana nasionalisme dan keindonesiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beny Giay, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua*, Benny Giay, Universitas Cendrawasih Papua, 2011
- Decki Natalis Pigay, 2000, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: Sinar Harapan)
- Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *West Papua: the obliteration of a people*, (London: Tapol)
- Garry van Klinken, *Perang kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, KITLF, 2007.
- John G. Strelan, 1977, *Search for salvation*, Adelaide: Lutheran Publishing House
- Nazaruddin, *Kajian Identitas Politik Aceh*, UGM 2010,
- Mohtar Mas’oed, Rizal Panggabean dan M Najib *Sumber-sumber sosial bagi Peradaban dan Partisipasi: Kasus Yogyakarta*, ISEAS, Singapura 2011,
- Soerjanto Poespowardojo, dan Frans M Parera, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, 1994, Kompas Gramedia, Jakarta
- Robert Putnam, *Social capital : a Handbook*, , 2011, Sage Pubication, England.
- R. Miachael Fenner dan Patrick Daly, *Memetakan Masa Lalu*, KITLV, 2011.
- Tamrin Amal Amagola, dkk, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barata, Maluku dan Poso*, ICIP 2007.